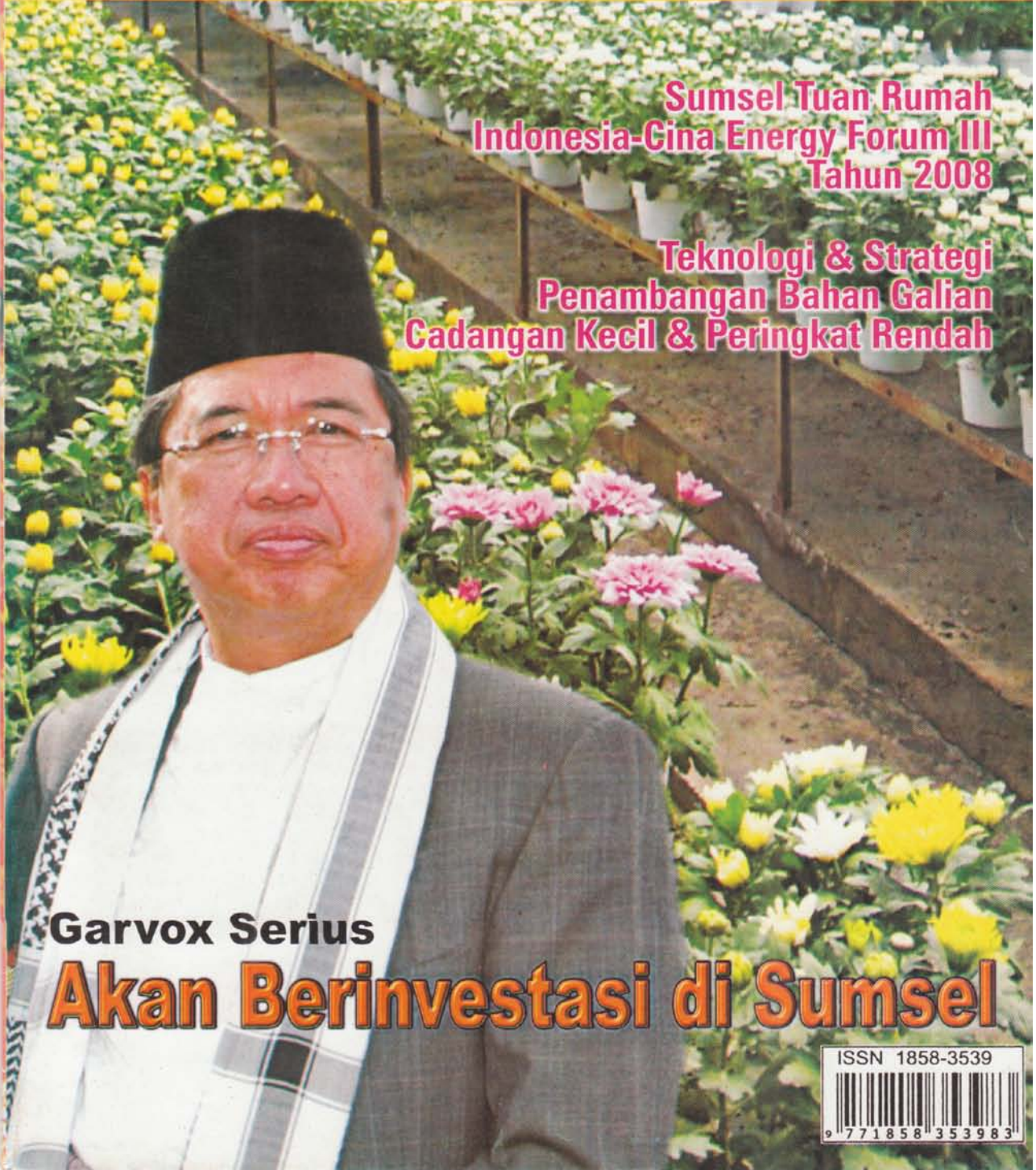




Media Informasi, Komunikasi dan Inovasi DRD & Balitbangda Sumsel

RIPTTEKS

Edisi 07. Desember 2006



**Sumsel Tuan Rumah
Indonesia-Cina Energy Forum III
Tahun 2008**

**Teknologi & Strategi
Penambangan Bahan Galian
Cadangan Kecil & Peringkat Rendah**

Garvox Serious

Akan Berinvestasi di Sumsel

ISSN 1858-3539



9 771858 353983

RIPTEKS

Diterbitkan Dewan Riset Daerah (DRD) & Balitbangda Sumatera Selatan

Pelindung/Penasehat
Kepala Balitbangda Sumatera Selatan
Ir. H. Darmansyah, MM
Ketua Dewan Riset Daerah (DRD)
Dr. Ir. H.M. Djoni Bustam, M.Eng

Pemimpin Umum
Dr. Ir. H.M. Taufik Toha, DEA

Pemimpin Redaksi
Dr. Hj. Isnawijayani, M.Si

Sekretaris Redaksi
Muhammad Isnaini, S.ag, M.Pd

Kontributor
Dr. Ir. H.M. Djoni Bustam, M.Eng
Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
Dr. Hj. Ekowati Retnaningsih, SKM, M.Kes
Sutrisno Badri, SE, M.Si
Dr. Ir. Yamin Hasan, MP
Ir. HM. Najib Asmani, M.Si
Dr. Ir. H.M. Taufik Toha, DEA
Dr. Ir. H.M. Said, M.Sc
Dr. H.A. Karim Gaffar, SU
Dr. Hj. Isnawijayani, M.Si
Ir. Sarino, M.Sc
Amrullah, SH, SU
Drs. Didi tahjuddin, M.Si
Drs. Saipan Djambak, M.Si
Muhammad Isnaini, S.ag, M.Pd
Drs. Imron Hakim, M.Si
Amidi, SE, M.Si

Redaksi menerima sumbangan tulisan, berita ataupun hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan misi RIPTEKS, berupa CD. Sumbangan tersebut dapat dikirimkan ke Sekretariat DRD Sumsel. Dengan Alamat Balitbangda Sumsel Jl. Demang Lebar Daun No. 4864 Palembang 30137.
Phone +62-711-374456 ext 115,
Fax +62-711-374456, 313247.
Email : drd-sumsel@indo.net.id
Home page : www.drd-sumsel.or.id

Daftar Isi

Berita Utama

05 Garvox Serius
Akan Berinvestasi di Sumsel

Kajian

10 Revitalisasi Pertanian & Kekuatan Kolektif untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Penanggulangan Kemiskinan
Oleh : **Najib Asmani**

Pertanian

15 Lumbung
Oleh : **H. Amin Sarwoko**

Monitoring

17 Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Sebagai Ranah Publik Bagi Kemaslahatan Masyarakat
Oleh : **Dr. Hj. Isnawijayani, M.Si**

Artikel

22 Alat Pengering Surya Thermal Murah, Sederhana dan Praktis
Oleh : **Taufik Toha**

Profil

26 Ekowati, Sekretaris DRD Sumsel, cum laude dan tercepat S3 FKM UI, asal Sumsel
Dokter Tercepat, IPK Capai 3,87

Revitalisasi Pertanian & Kekuatan Kolektif untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Penanggulangan Kemiskinan

Oleh : Najib Asmani

(Lektor Kepala Fak. Pertanian Unsri, Anggota Komisi Pangan Dewan Riset Daerah Sumsel, & Anggota Deklarator BARINDO Sumsel)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia ke depan adalah menganut paradigma Pembangunan Manusia Indonesia (PMI), yang selain bertujuan untuk pembangunan ekonomi juga difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat diukur dari tingginya GNP, inflasi yang rendah, dan stabilitas moneter, yang kesemuanya sangat bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi politik global. Pembangunan manusia merupakan suatu investasi dalam "capacity building" terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar manusia mencakup hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, dan hak atas rasa aman. Pemenuhan hak atas pangan lebih ditekankan pada "food security" yaitu dengan ketersediaan aneka ragam pangan, kemandirian pangan dalam suatu wilayah, serta pencegahan rawan pangan dan gizi buruk.

Ukuran keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tolok ukur UNDP dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. IPM dilihat dari tiga dimensi, yakni: menjalani kehidupan yang sehat dan lama (kesehatan) yang diukur dari Angka Harapan Hidup pada saat lahir, memiliki pengetahuan (pendidikan) yang diukur dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, serta menikmati kehidupan yang layak (ekonomi) yang diukur dari pengeluaran riil per kapita.

IPM Indonesia, berdasarkan Human Development Report Tahun 2005, baru mencapai angka 65,8 (Human Development Report, 2005) menempati ranking ke 110 dari 177 negara di dunia (Malaysia ranking 61, Thailand ranking 73 dan Filipina ranking 84). IPM Sumatera Selatan berada pada angka 69,6 (Lampung angka 68,4, Bangka Belitung angka 69,6, Bengkulu angka 69,9 dan dan Jambi angka 70,1) menduduki ranking ke13 dari 33 propinsi di Indonesia. Nilai dan Peringkat IPM dari 33 propinsi di Indonesia serta Nilai dan Peringkat IPM 14



kabupaten dan kota di Sumsel dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2, sedangkan Nilai dan Peringkat 10 besar IPM dari 440 kota/kabupaten di Indonesia disajikan pada Tabel 3. Dari Tabel 2, terbaca bahwa di daerah yang menjadi sentra komoditi pangan OKU Timur dan Musi Rawas, kontradiktif menempati ranking IPM yang rendah. Daerah yang IPM terbaik (Tabel 3) di Sumatera yakni Bengkulu, Padang dan Padang Panjang usaha pertaniannya lebih memfokuskan pada industri pengolahan hasil untuk mendapatkan nilai tambah.

Tabel 1. Data IPM Propinsi-propinsi di Indonesia

Propinsi	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rerata Lama Sekolah (Tahun)	Rerata Pengeluaran Riil/Kapita (x1.000 Rp)	IPM	Peringkat
DKI Jakarta	72,4	98,3	10,4	618,1	75,8	1
Sulawesi Utara	71,0	99,1	8,6	611,9	73,4	2
DI Yogyakarta	72,6	85,8	8,2	636,7	72,9	3
Kalim	69,7	95,0	8,5	620,6	72,2	4
Riau	69,8	96,4	8,2	616,6	72,2	5
Kalteng	69,8	96,2	7,8	615,5	71,7	6
Sumut	68,2	96,6	8,4	616,0	71,4	7
Kep. Riau	68,8	94,7	8,0	613,0	70,8	8
Sumbar	67,6	95,7	7,9	615,7	70,5	9
Jambi	67,6	95,8	7,4	615,1	70,1	10
Bengkulu	67,4	94,2	7,8	615,5	69,9	11
Bangka Belitung	67,2	93,5	6,5	627,2	69,6	12
Sumsel	67,7	95,7	7,4	608,4	69,6	13
Jawa Barat	66,7	94,0	7,2	616,1	69,1	14
Bali	70,2	85,5	7,3	614,8	69,1	15
Maluku	66,2	97,8	8,4	596,1	69,0	16
Jawa Tengah	69,7	86,7	6,5	618,7	68,9	17
NAD	67,9	95,7	8,4	585,8	68,7	18
Lampung	67,6	93,1	7,0	604,8	68,4	19
Banten	63,3	94,0	7,0	618,0	67,9	20
Sulawesi Selatan	68,7	84,5	6,8	615,2	67,8	21
Sulawesi Tengah	64,6	94,4	7,5	604,4	67,3	22
Jawa Timur	67,2	84,5	6,6	616,6	66,8	23
Kalsel	61,6	94,8	7,2	619,8	66,7	24
Sulawesi Tenggara	66,0	90,7	7,5	596,1	66,7	25
Maluku Utara	63,3	95,2	8,5	588,9	66,4	26
Kalbar	64,8	88,2	6,4	606,7	65,4	27
Garontalo	64,5	94,7	6,8	585,9	65,4	28
Sulawesi Barat	66,3	82,9	5,9	602,2	64,4	29
Irian Jaya Barat	66,8	85,1	7,1	571,5	63,7	30
NTT	64,4	85,2	6,2	585,1	62,7	31
Papua	65,8	74,2	6,1	583,8	60,9	32
NTB	59,4	78,3	6,4	611,0	60,6	33

Sumber : Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, 2006

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dapat dilihat dari Nilai dan Rata-rata Kabupaten/kabupaten dan Kota/kabupaten di Indonesia. Dari Tabel 2 dan 3, dapat menjadi sentra pembangunan Musi Rawas, Kabupaten Pangajene Kepulauan di Sumatera Utara. Panjang usaha pada industri tekstil nilai tambah.

di Indonesia

Ranking	IPM	Peringkat
1	75,8	1
2	73,4	2
3	72,9	3
4	72,2	4
5	72,2	5
6	71,7	6
7	71,4	7
8	70,8	8
9	70,5	9
10	70,1	10
11	69,9	11
12	69,6	12
13	69,6	13
14	69,1	14
15	69,1	15
16	69,0	16
17	68,9	17
18	68,7	18
19	68,4	19
20	67,9	20
21	67,8	21
22	67,3	22
23	66,8	23
24	66,7	24
25	66,7	25
26	66,4	26
27	65,4	27
28	65,4	28
29	64,4	29
30	63,7	30
31	62,7	31
32	60,9	32
33	60,6	33

Indonesia, 2006

Tabel 2. Data IPM 14 Kabupaten/ Kota di Sumsel

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rerata Lama Sekolah (Tahun)	Rerata Pengeluaran Riil/Kapita (x1.000 Rp)	IPM	Peringkat Nasional
Palembang	69,5	97,4	9,5	616,5	73,1	58
Patomuh	69,5	97,5	8,3	596,8	70,7	116
Pagaralam	68,7	96,9	7,9	591,2	69,5	157
OKU	68,0	94,8	6,9	610,2	69,3	165
MOJA	67,9	95,7	6,7	594,5	68,1	215
Muara Enim	65,8	98,8	7,2	595,5	68,1	217
OKU	66,0	94,3	6,6	612,8	68,1	218
OKU Selatan	68,0	93,5	6,7	597,8	67,9	223
Lahat	66,3	95,7	7,0	590,2	67,2	264
Banyuwangi	66,1	93,4	7,0	593,6	66,7	280
Lubuk Linggau	64,1	94,3	7,6	587,1	65,8	316
Cyan Bir	64,4	93,8	6,5	594,7	65,6	326
OKU Timur	67,8	90,9	6,3	573,0	65,1	341
Musi Rawas	62,6	94,8	6,7	586,7	64,4	363

Sumber : Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, 2006.

Tabel 3. Data IPM 10 Besar dari 440 Kabupaten/ Kota di Indonesia

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rerata Lama Sekolah (Tahun)	Rerata Pengeluaran Riil/Kapita (x1.000 Rp)	IPM	Peringkat Nasional
Jakarta Selatan	72,1	97,9	10,8	639,5	77,4	1
Jakarta Utara	72,9	96,7	10,7	637,9	77,4	2
Depok	72,3	97,2	10,0	639,3	76,8	3
Palembang Raya	72,9	99,3	10,4	620,6	76,4	4
Kabupaten	71,9	95,7	10,3	636,3	76,2	5
Kabupaten Timur	72,5	98,8	10,9	616,5	76,2	6
Bengkulu	69,6	99,0	10,6	636,2	75,9	7
Kabupaten	72,0	99,5	10,4	618,5	75,9	8
Pangkal	69,4	99,2	10,7	634,9	75,8	9
Kabupaten Pangang	69,6	99,1	10,1	639,2	75,8	10

Sumber : Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, 2006

Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan terutama untuk menggerakkan sektor riil dengan melakukan revitalisasi pertanian dan industri pedesaan. Tujuannya adalah untuk mendorong percepatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, memberantas pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan standar hidup yang layak. Mencermati kondisi yang ada, dalam upaya Pembangunan Manusia Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan dengan suatu Program Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian yang memberikan efek yang komprehensif. Dihasilkannya aneka ragam jenis pangan sekaligus meningkatkan produktivitas dan mutu hasilnya. Dengan adanya kecukupan pangan adalah untuk pencegahan busung lapar dan gizi buruk. Dari sisi ekonomi sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan terbukanya peluang kerja dan usaha. Pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan per kapita, serta sekaligus dapat memperbesar porsi pengeluaran untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

II. KEMISKINAN DAN REVITALISASI PERTANIAN

Jumlah penduduk Indonesia masih banyak yang tergolong miskin yang umumnya tinggal di pedesaan, menurut BPS Tahun 2005 jumlah penduduk dengan pendapatan per kapita di bawah Rp.152.847 per bulan di Indonesia sebanyak 39,05 juta jiwa (17,75%). Penduduk miskin di Sumsel dari kriteria nilai asupan kalori per jiwa di bawah 2.100 kalori sebanyak 22,33% (BPS, 2003). Berdasarkan kriteria BKKBN Tahun 2004 di Sumsel penduduk Pra-KS 356.542 keluarga dan KS-I 476.336 keluarga atau total keseluruhan sebesar 55,49% dari 1.500.824 keluarga.

Sebagian besar penduduk Sumsel 66,02% bekerja di sektor primer atau pertanian, yang lainnya bekerja di sektor sekunder atau manufaktur sebesar 24,43% dan sektor tersier atau jasa sebesar 9,55%. SDM di Sumsel masih belum diberdayakan secara penuh, hanya 40% yang mempunyai jam kerja di bawah 35 jam per minggu. Jumlah pengangguran di Sumsel Tahun 2003 sebanyak 9,65% atau 303.500 orang dari angkatan kerja yang ada.

Walau mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, namun dalam penyediaan pangan nasional terutama beras, Indonesia masih tergolong rawan. Produksi padi nasional Tahun 2005 sebesar 53,98 juta ton (produktivitas rata-rata 4,4 ton per HA), atau setara 31,63 juta ton beras dengan konsumsi beras sebesar 30,57 juta ton (berdasar asumsi jumlah penduduk Indonesia 219 juta jiwa dengan konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun). Surplus beras hanya sebesar 1,06 juta ton (3,47% dari konsumsi nasional atau hanya untuk cadangan 12 hari saja), sedangkan di negara maju cadangan beras nasional antara 2 sampai 3 tahun.

Di Sumsel, pemanfaatan potensi pertanian, perikanan dan peternakan masih relatif rendah. Pemanfaatan lahan untuk usaha komoditi pangan, baru mencapai seluas 591.371 HA atau 34,59% dari potensi yang ada 2.018.445 HA, dan produktivitas padi masih relatif rendah, baru mencapai 3,5 ton per HA atau setara 2,2 ton beras. Di sektor perikanan, pemanfaatan potensi sumberdaya air, untuk budidaya ikan air payau baru mencapai seluas 27.116 HA (10,81%) dari potensi luas 250.820,00 HA, dan untuk budidaya ikan air tawar baru mencapai 8.402,00 (47,20%) dari potensi 17.800 HA. Di sektor peternakan, pemanfaatan lahan untuk pakan hijauan ternak, baru mencapai 1.000.000 ton berat kering atau 14,64% (setara 438.666 ekor sapi berat 150 kg) dari potensi 6.830.370,00 ton (2.996.352 ekor sapi).

Kehidupan penduduk Sumsel masih banyak yang belum layak, dari rata-rata pengeluaran riil per kapita dari baru sebesar Rp. 608.400,00. Penduduk yang

mempunyai pengeluaran per kapita sebulan dengan selang pengeluaran antara Rp100.000,00 sampai Rp. 149.999,00 sebanyak 34,02%.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia, Presiden RI telah merancang konsep Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). RPPK merupakan rancangan program terpadu untuk memberdayakan (empowerment) kehidupan petani dan masyarakat pedesaan. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat. Sasaran dari program tersebut terjadi pertumbuhan pertanian rata-rata 3,5 persen per tahun.

Revitalisasi pertanian dilakukan secara bertahap, langkah awal dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti prasarana irigasi, jalan-jalan di sentra produksi, pelistrikan. Kebijakan lainnya karena semakin menyempitnya lahan pertanian yang dialihkan untuk industri, adalah yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Pemerintah telah menargetkan pada Tahun 2010 Indonesia mempunyai 15 juta hektar tanah pertanian abadi. Secara mikro, di Sumsel terutama pada lahan irigasi, kepemilikan lahan terjadi fragmentasi yakni semakin menyempitnya kepemilikan lahan petani karena dibagikan kepada anak cucu sebagai warisan. Luas kepemilikan lahan petani secara per orang sudah banyak yang berkisar 0,3 sampai 0,5 hektar. Juga status petani sudah banyak yang beralih dari petani pemilik penggarap menjadi buruh tani. Menoleh kemakmuran petani di negara tetangga Malaysia yang memiliki luas pertanian kepemilikan perorang sekitar 5 hektar, pemerintah berupaya ke depan pada daerah-daerah yang masih banyak tersedia lahan, memprogramkan kepemilikan lahan bagi petani kisaran 4 sampai 5 hektar per orang. Di negara-negara maju seperti Jepang dan Taiwan, pengelolaan lahan petani per orang dikelola secara "corporate", dimana dalam pengelolaannya secara perusahaan yang profesional melalui koperasi.

Usaha meningkatkan Indeks Pembangunan Indonesia di Sumatera Selatan yang mayoritas penduduknya petani dan berada di pedesaan titik tolaknya adalah revitalisasi pertanian, perternakan dan perikanan untuk ketahanan pangan. Selain upaya yang dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan intensitas penggunaan lahan, juga dilakukan diversifikasi usaha. Diversifikasi dapat dilakukan dengan mengusahakan aneka ragam tanaman atau komoditi dengan memulai dari pemanfaatan lahan pekarangan. Langkah awal dari program ketahan

pangan adalah bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dengan tersedianya pangan keluarga berarti secara riil jumlah pengeluaran rumah tangga akan bertambah. Implikasi dari tersedianya pangan secara mandiri akan mempengaruhi terpenuhi gizi keluarga, dan dari dimensi kesehatan akan berpengaruh terhadap umur harapan hidup. Selanjutnya program ketahanan pangan, setelah berhasil memenuhi pangan keluarga akan berkembang menjadi ketahanan pangan desa yang akan mewujudkan Desa Mandiri Pangan.

Pemerintah dalam program revitalisasi pertanian agar tidak terjadi "over supply" dapat menyusun pelayanannya atau "cluster" pertanian, dengan memilih komoditi prioritas. Sumatera Selatan yang memiliki keragaman ekosistem, di setiap kabupaten untuk ditetapkan komoditi unggulan utama. Beberapa provinsi di Indonesia dalam pembangunan pertanian telah melaksanakan program komoditi prioritas seperti Propinsi Gorontalo dengan komoditi Jagung, Propinsi Jambi dengan komoditi ikan air tawar/sungai, dan Propinsi Bengkulu dengan industri makanan dari hortikultura. Propinsi Sumatera Selatan dengan luasnya wilayah pasang surut dan wilayah pesisir dapat saja memprioritaskan pengembangan tanaman padi pasang surut dan udang.

Tujuan lain dari revitalisasi pertanian adalah membangun ekonomi pedesaan sehingga menjadi Desa Unggul. Keberhasilan dalam peningkatan produksi di pedesaan harus diikuti dengan meningkatnya permintaan (demand) serta menumbuhkan sektor-sektor lainnya. Keberhasilan pembangunan pertanian di pedesaan terkait dengan pengembangan industri pedesaan yang mengolah produk primer menjadi produk yang mempunyai nilai tambah, dapat menciptakan kegiatan bisnis di pedesaan untuk berkembang dengan cepat. Dana yang beredar di pedesaan dan simpanan masyarakat pedesaan porsinya jangan lebih besar dimanfaatkan oleh masyarakat perkotaan, justeru sebaliknya dana orang kota lebih banyak disedot oleh masyarakat pedesaan. Pemerintah harus memberikan kemudahan dan menjamin keamanan agar investor dapat melakukan investasi industri pengolahan produk primer di pedesaan.

Keberhasilan revitalisasi pertanian harus ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan. Kualitas SDM petani sebagai pelaku dari pembangunan pertanian masih dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan, yakni masih rendahnya inovasi, komunikasi, kemampuan teknis dan manajerial petani. Selain dari petani, juga pembimbing lapangan

petani masih terbatas baik jumlahnya maupun kualitasnya. Dari sisi kelembagaan pertanian dan usaha yang ada di pedesaan, koperasi, UKM dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) masih banyak yang belum mampu berkompetitif dikarenakan masih lemahnya manajemen, terbatasnya jaringan bisnis, dan masih lemahnya pendanaan yang dimiliki. Pemerintah selain menyiapkan tenaga penyuluh lapangan pertanian, juga mengkaderkan petani-petani menjadi "spot worker" tenaga mada pertanian yang mempunyai jiwa "entrepreneurship" yang dididik melalui sekolah-sekolah lapang pertanian yang berada di sentra-sentra produksi pertanian. Petugas lapangan dan "spot worker" dalam membimbing petani dapat diprogramkan untuk disediakan lahan pertanian atau unit usaha sebagai media aplikasi teori dan sekaligus untuk menjadi unit bisnis yang menghasilkan inkam. Kelembagaan petani untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan baik dalam manajemen, ketrampilan, teknologi, penyediaan bahan baku, pendanaan, akses dan jaringan pemasaran, dan urusan dengan pihak birokrasi.

III. KEKUATAN KOLEKTIF

Petani dan pengusaha kecil di pedesaan dalam menjalankan usahanya umumnya secara sendiri-sendiri tidak secara kolektif, baik dalam kegiatan produksi maupun pemasaran. Permasalahan yang sering dialami oleh petani dan UKM adalah lemahnya posisi rebut tawar (bargaining position). Sebagai ilustrasi ketika hasil panen petani melimpah, apalagi produk hortikultura dan perikanan yang cepat membusuk, petani tidak bisa mendapatkan harga yang layak dari konsumen atau pedagang. Kondisi tersebut akan melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan komoditi yang sama di musim berikutnya. Kasus lain dalam pembelian bahan baku, pengusaha kecil sering membeli tunai atau bila harus hutang dikenakan bunga tinggi, tetapi bila menjual hasil produknya kadang kala tidak tunai tetapi secara angsuran. Di pedesaan ada juga kekuatan kolektif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau koperasi, tetapi ini belum banyak mendukung untuk penguatan posistis rebut tawar petani. Kekuatan kolektif yang baru terlihat baru di sektor perkebunan yakni KUD petani plasma kelapa sawit atau karet tetapi ini dihadapkan pada pasar "monopsoni". Di sektor pertanian pangan atau padi, kekuatan kolektif petani dalam kelompok tani hanya pada waktu pengurusan kredit pertanian, dan di dalam melaksanakan kegiatan lainnya lebih banyak sendiri-sendiri.

Kekuatan kolektif dalam pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan dan revitalisasi pertanian

harus melibatkan semua "stakeholder", yang meliputi masyarakat, LSM/pakar, swasta, lembaga keuangan dan pemerintah dalam suatu sistem. Kemitraan antara petani/UKM dengan pengusaha besar yang pernah dilakukan selama ini sering terjadi perbedaan persepsi. Petani/pengusaha kecil merasakan bahwa kemitraan yang ada lebih banyak menguntungkan pengusaha besar. Di negara-negara maju karena petani dan UKM menyatu dalam kekuatan kolektif sehingga kemitraan bersifat "win-win" dan transparan. Contoh kemitraan di Jepang dimana pengusaha kecil/industri rumah tangga sebagai penyuplai komponen-komponen jadi atau setengah jadi yang diperlukan untuk menghasilkan produk oleh industri besar. Di negara kita, industri besar umumnya memproduksi seluruh komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk utama, dan masyarakat hanya sebagai buruh saja, walaupun ada kemitraan dengan pengusaha kecil, itupun hanya sebagai pemasok bahan baku saja. Petani atau pengusaha kecil walaupun sudah bermitra perkembangannya masih tertatih-tatih, lambat sekali mengalami kemajuan bahkan banyak yang "berjalan di tempat". Petani dan pengusaha kecil hampir tidak ada keunggulan komparatif yang membuat prospek cerah untuk berkembang. Forum komunikasi atau asosiasi yang ada yang berlabel mengembangkan petani/pengusaha kecil eksistensinya hanya menyangkut kepentingan sesaat dan legitimasi kepentingan untuk kelompok-kelompok tertentu saja.

Dari aspek finansial, para petani dan pengusaha kecil mempunyai keterbatasan dalam akses modal dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman, serta ketidakpercayaan bank atau lembaga keuangan terhadap kinerja usaha yang dilakukan. Sehingga usahatani/usaha kecil yang dilakukan oleh petani lambat mengalami perkembangan. Ada skim pembiayaan kredit yang diluncurkan oleh pemerintah sering mengalami proses yang panjang dan berbelit-belit, dan kadang kala jumlah yang diterima tidak utuh dan tidak tepat waktu yang berakibat mengganggu "cash flow" usaha. Persoalan yang banyak dihadapi oleh petani dan pengusaha kecil dalam permodalan adalah persoalan kelembagaan, ketidakmampuan mengakses informasi dan jenis pembiayaan yang beragam yang disediakan oleh lembaga perbankan dan non bank. Persoalan lainnya adalah yang berkaitan dengan prosedur dan penilaian dari pihak perbankan yang masih terlalu rumit, menghendaki adanya anggunan, dan bunga terlalu tinggi.

Peran LSM/Pakar sangat dibutuhkan dalam pendampingan usaha yang dilakukan oleh petani dan

pengusaha kecil. Pengalaman yang ada selama ini usaha yang dilakukan oleh petani/pengusaha kecil biasanya mengalami kemajuan ketidada adanya pendampingan, dan akan pupus ketika pendamping tidak ada lagi. Tetapi ada juga pihak pendamping hanya memanfaatkan peluang dalam melakukan pembinaan, dan akan berlalu ketika pentingan tercapai. Para pendamping mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan kegiatan terutama dalam hal pendanaan. Diperlukan sponsor pembiayaan agar kegiatan dapat berkesinambungan, dan kalau mengharapkan kontribusi dari petani/pengusaha kecil yang dibina tentunya akan memberatkan pihak yang dibina. Di negara-negara maju dalam membina masyarakat yang marginal sumber pendanaan berasal dari "foundation" dan pihak pendamping mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang tinggi.

Peran pemerintah dalam upaya mengembangkan unit usaha di pedesaan adalah mengoptimalkan pelayanan birokrasi. Petani dan pengusaha kecil masih sering kesulitan mendapatkan informasi menyangkut prosedur berbagai jenis peraturan dan perijinan usaha, perolehan fasilitas pengembangan usaha kredit, promosi dan pelatihan. Kesulitan mendapatkan informasi, sering disalah artikan oleh oknum sebagai komoditi yang diperdagangkan yang diukur dengan sejumlah uang. Para pengusaha kecil/petani sering merasakan kompleks, tumpang tindih dan berbelit-belit aturan yang dikeluarkan oleh departemen teknis yang memiliki kepentingan yang sama dengan petani/pengusaha. Kualitas SDM di tingkat birokrasi masih ada yang tidak memadai dan tidak profesional, yang sering tidak tepat dalam menginterpretasikan suatu aturan, lambat merespon dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang cepat dan tepat. Penerapan aturan kadangkala masih bersifat diskriminatif berdasarkan status sosial, gender, etnis dan kesukuan, dan masih juga ada pungutan-pungutan atau sumbangan-sumbangan di luar aturan.

Dalam meningkatkan IPM, kekuatan kolektif merupakan upaya dalam penguatan kapasitas peran semua pihak untuk meningkatkan produktivitas usaha. Kekuatan kolektif merupakan suatu kemitraan yang perlu dilaksanakan dalam suatu sistem yang "win-win" dan transparan. Petani/pengusaha kecil sebagai ujung tombak pengembangan pedesaan adalah mitra atau suatu sub sistem yang keberadaannya merupakan suatu mata rantai yang terpisahkan dalam suatu sistem.

IV. PENUTUP

Revitalisasi pertanian dan kekuatan kolektif adalah merupakan strategi untuk peningkatan Indeks

Pembangunan Masyarakat (IPM) dengan dimensi indikator dari pengeluaran riil per kapita. Besarnya pengeluaran riil per kapita dapat dicerminkan dari pendapatan per kapita. Sebagian besar penduduk Indonesia dan Sumatera Selatan bekerja di sektor primer yakni pertanian. Dalam upaya peningkatan pendapatan per kapita maka perlu ditingkatkan kinerja usaha berbasis pertanian secara terpadu hulu dan hilir. Peningkatan kinerja pertanian selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan inkom atau kesejahteraan petani, juga untuk ketahanan pangan, penyediaan pangan keluarga dan masyarakat. Ketersediaan pangan bagi keluarga dan masyarakat berimplikasi terhadap kecukupan gizi dan kesehatan. Dalam pengembangan usaha pertanian dan usaha kecil menengah di pedesaan perlu kekuatan kolektif semua pihak dengan prinsip "win-win" dan transparan. Keberadaan para investor, permodalan yang mudah di akses, pendamping yang kompeten, dan pelayanan birokrasi yang baik dari pemerintah akan berkorelasi positif terhadap pengembangan usaha di pedesaan dan revitalisasi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. Fauzi. 2005. *Manajemen Pembangunan Agribisnis*. Inti Vidya Publisher. Jakarta
- Asmani, Najib. 2006. *Produksi dan Konsumsi Beras Nasional*. Makalah Pembahas Seminar Nasional Beras. Dewan Riset Daerah Sumsel. Palembang, Juli 2006.
- BPS. 2006. *Produksi dan Konsumsi Beras Nasional Tahun 2005*. Laporan Tahunan. Jakarta.
- Gubernur Sumatera Selatan. 2006. *Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan Sebagai Implementasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK)*. Makalah Seminar Nasional dan Musyawarah Kerja VI DPW I PORMASEPI. Palembang, September 2006.
- The Asia Foundation. 1999. *Kekuatan Kolektif Sebagai Strategi Mempercepat Pemberdayaan Usaha Kecil*. Jakarta, April 1999.
- Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. 2006. *Informasi Dasar Kongres Nasional Pembangunan Indonesia 2006*. Jakarta, November 2006.